

Pemikiran Dan Implementasi Pemikiran B.J. Habibie Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia

Bonivasius Tatebburuk

Magister ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email Korespondensi: Sabulukunganjaya@gmail.com

Abstract: *Indonesia's economy experienced a monetary crisis during President Soeharto's administration, which occurred between 1997-1998 and led to various economic problems that eventually resulted in his resignation. Leadership then shifted to B.J. Habibie, who worked hard to restore the national economy through his economic policies. President B.J. Habibie focused his efforts on strengthening and recovering the economy after the monetary crisis. Although there were signs of improvement, such as a decrease in inflation and an appreciation of the rupiah against the US dollar, consumer purchasing power remained low, and public trust in the president declined as he was still seen as part of the New Order regime.*

Keywords: *B.J. Habibie; Crisis; Economic;*

Abstrak: Perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang berlangsung antara tahun 1997-1998 dan menyebabkan berbagai masalah ekonomi yang akhirnya mengarah pada pengunduran dirinya. Kepemimpinan kemudian beralih ke B.J. Habibie, yang berupaya keras memulihkan kondisi perekonomian melalui kebijakan-kebijakan ekonominya. Presiden B.J. Habibie memusatkan perhatiannya pada penguatan dan pemulihan ekonomi setelah krisis moneter. Meskipun ada tanda-tanda perbaikan seperti penurunan inflasi dan peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, daya beli masyarakat tetap menurun, dan kepercayaan publik terhadap presiden menurun karena ia masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru.

Kata Kunci: B.J. Habibie; Krisis; Ekonomi;

Article Information: Submitted: 2024-05-27; Revised 2024-08-01; Accepted: 2024-09-27

INTRODUCTION

Pada era Orde Baru, Indonesia mengalami berbagai peristiwa penting dalam sejarahnya. Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, kebijakan yang diterapkan tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Era ini dimulai dengan keputusan Presiden Soekarno yang memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan stabilitas negara. Mandat ini dikenal sebagai Supersemar, instrumen penting dalam peralihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto [1]. Sejak saat itu, kebijakan militer diterapkan oleh Soeharto, menandai dimulainya Orde Baru. Di balik kemajuan yang dicapai, era ini juga memiliki sisi gelap, terutama kebijakan yang berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Krisis mata uang yang melanda Indonesia menjadi faktor utama runtuhnya pemerintahan Soeharto.

Jatuhnya Soeharto, yang telah memimpin selama lebih dari tiga dekade, menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia [2]. Pada 11 Maret 1966, Soeharto



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menerima mandat untuk mengambil alih kekuasaan, menandai awal kekuasaannya yang berakhir pada 1998 setelah krisis ekonomi menghantam Indonesia. Krisis ini menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga-harga bahan pokok, dan kebangkrutan perusahaan kecil dan menengah, yang berujung pada pengangguran massal dan peningkatan kejahatan. Tuntutan reformasi dari masyarakat dan mahasiswa mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri, menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sesuai aturan yang berlaku.

Masa pemerintahan Habibie relatif singkat dibandingkan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun [3]. Setelah pelantikannya pada 21 Mei 1998, Habibie menghadapi tantangan besar, terutama dalam memperbaiki ekonomi yang runtuh akibat krisis mata uang. Meskipun pelantikannya dianggap kontroversial, secara hukum tetap sah [4]. Tugas utama Habibie adalah menstabilkan ekonomi yang terpuruk, dengan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk merespons tuntutan masyarakat di berbagai sektor, terutama ekonomi.

Krisis mata uang yang terjadi sejak 1997 memaksa pemerintahan Habibie untuk segera bertindak demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Krisis ini juga menjadi faktor utama yang melemahkan posisi Soeharto. Dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan, Habibie berupaya mengatasi dampak krisis tersebut, meskipun masa jabatannya singkat, tetapi kebijakan yang dikeluarkannya memiliki dampak signifikan dalam transisi dari era Orde Baru ke masa reformasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan sebagai dasar pengumpulan datanya. Metode ini mengandalkan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber pustaka, baik sumber primer maupun sekunder. Bahan-bahan tersebut dapat berupa penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun online, yang valid dan terverifikasi berdasarkan fakta dan peristiwa sejarah. Sumber yang digunakan meliputi referensi, jurnal ilmiah, serta jurnal elektronik yang relevan dengan topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

Situasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia Menjelang Lengsernya Presiden Soeharto dan Peralihan Kekuasaan ke Pemerintahan B.J. Habibie pada Tahun 1998.

Sosial

Pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, banyak kemajuan ekonomi telah dicapai. Namun, krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 membawa dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. Terjadinya krisis mata uang dan ekonomi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, dengan lebih dari 4 juta pekerja kehilangan pekerjaan antara Mei 1997 dan Mei 1998 [5]. Dampak dari tingginya angka PHK ini tidak hanya menghantam perekonomian, tetapi juga menciptakan krisis sosial yang parah. Industri-industri yang sebelumnya menjadi



tulang punggung ekonomi mengalami penurunan produksi, banyak yang bangkrut, dan akhirnya berdampak pada sektor pendidikan. Banyak keluarga yang tidak lagi mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada awal 1998, angka partisipasi siswa di sekolah dasar dan menengah mengalami penurunan drastis, dengan hanya 14,4% laki-laki dan 19,4% perempuan yang dapat melanjutkan pendidikan mereka [6].

Ekonomi

Secara ekonomi, krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan nilai tukar rupiah terjun bebas, mencapai kisaran Rp 14.000 hingga Rp 17.000 per dolar AS. Melemahnya nilai tukar ini semakin diperburuk oleh aksi para spekulan yang menarik modal mereka dari pasar modal, menyebabkan ekonomi nasional mengalami stagnasi. Bank Indonesia (BI) yang seharusnya berperan sebagai pengatur kebijakan moneter gagal menjalankan fungsinya dengan efektif [7]. Akibatnya, banyak perusahaan tidak mampu bertahan karena tingginya biaya kredit, menyebabkan banyak yang bangkrut. Dua sektor yang paling terdampak adalah perdagangan, yang turun hingga -18,9%, dan manufaktur, yang merosot hingga -13% pada awal 1998 [8].

Politik

Dalam ranah politik, ketidakstabilan semakin meruncing. Pemerintahan Soeharto yang selama ini tampak kuat mulai rapuh seiring dengan kegagalannya dalam menangani krisis. Sistem ekonomi kapitalis yang dijalankan oleh Orde Baru memicu korporatisasi yang tidak merata, memperparah ketimpangan sosial, dan meningkatkan praktik korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Beberapa kasus besar, seperti proyek mobil nasional dan monopoli produksi cengkeh, menimbulkan kemarahan publik dan merugikan produsen dalam negeri. Menjelang Sidang Istimewa MPR tahun 1998, situasi politik semakin memanas, terutama dengan meningkatnya demonstrasi mahasiswa yang menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya. Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, meskipun peralihan ini tidak serta-merta meredakan ketegangan politik. Masyarakat tetap skeptis terhadap transisi kepemimpinan tersebut, meskipun Habibie berjanji akan memimpin reformasi dan mengatasi krisis ekonomi [5].

Selama masa kepemimpinannya dari 1998 hingga 1999, Presiden B.J. Habibie berupaya keras mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia melalui berbagai kebijakan yang signifikan.

Restrukturisasi Perbankan

Saat awal menjabat, Habibie menghadapi sistem perbankan yang sedang dalam kondisi buruk. Banyak bank tidak lagi berfungsi sebagai perantara aliran modal. Sebagai respons, Habibie melikuidasi 38 bank, mengambil alih 7 bank, dan melakukan rekapitalisasi terhadap 9 bank lainnya. Langkah-langkah ini diawasi oleh Badan



Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memastikan proses likuidasi berjalan lancar, tanpa menyalahgunakan simpanan nasabah. Kebijakan ini berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang beroperasi, dan turut meningkatkan jumlah investor [7]. Dampaknya, inflasi yang sebelumnya sangat tinggi berhasil dikendalikan. Tingkat inflasi yang mencapai 77,5% pada tahun 1998 turun drastis menjadi hanya 2,01% pada 1999 [9].

Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Habibie juga menerapkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat miskin. Fokus program ini adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Di sektor kesehatan, pemerintah menyalurkan bantuan kepada ribuan puskesmas dan program pemberdayaan desa, sementara di bidang pendidikan, bantuan beasiswa disalurkan kepada 4 juta anak untuk mengurangi angka putus sekolah [5]. Upaya ini efektif mengurangi dampak langsung krisis terhadap kesejahteraan masyarakat.

Program Pemberdayaan Rakyat

Salah satu kebijakan yang diambil Habibie adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi. Pemerintah menyalurkan dana kepada kelompok tani dan koperasi untuk memperkuat perekonomian rakyat. Pada 1998-1999, sebanyak 5,13 juta petani dan ribuan koperasi menerima dana bantuan, sehingga UKM menjadi salah satu pilar pemulihan ekonomi nasional [5].

Pengaruh Kebijakan Presiden B.J. Habibie

Kebijakan restrukturisasi perbankan membawa dampak positif pada stabilitas keuangan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terpuruk di angka -7% pada masa sebelumnya, meningkat menjadi 1% pada akhir 1999. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya sangat lemah, berhasil menguat dari Rp 17.000 menjadi Rp 7.000 per dolar AS. Peningkatan ini memberikan dampak signifikan pada menurunnya inflasi dan menguatnya daya beli masyarakat [5].

Peningkatan Dunia Usaha

Menguatnya nilai rupiah dan terkendalinya inflasi memberikan dorongan bagi sektor bisnis. Habibie memperkuat iklim usaha dengan menerapkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta meratifikasi empat konvensi ILO yang melindungi hak-hak buruh. Langkah ini menciptakan dasar bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan [5].

Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan, Habibie melaksanakan program PDKMK dan P3T yang berhasil membantu jutaan warga miskin dan pengangguran. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 12 juta orang pada akhir 1999 [10]. Selain itu, program JPS di bidang pendidikan dan kesehatan



membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan secara bertahap [5]. Melalui serangkaian kebijakan ini, Presiden B.J. Habibie berhasil memimpin pemulihan ekonomi Indonesia yang perlahan-lahan bangkit dari krisis besar.

KESIMPULAN

Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, dengan berbagai prestasi, tantangan, dan kesulitannya. Pengunduran diri Soeharto menandai akhir dari Orde Baru, dipicu oleh keresahan masyarakat yang menuntut reformasi di berbagai sektor, termasuk perubahan arah kebijakan. Selain itu, krisis mata uang yang melanda Indonesia memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Setelah pengunduran diri Soeharto, B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden mengambil alih kepemimpinan. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung selama 17 bulan, tugas yang diembannya sangat berat karena Indonesia tengah menghadapi krisis keuangan yang berawal dari krisis moneter di Asia. Krisis ini diperparah oleh pembangunan yang tidak selaras dengan konsep Repelita, utang luar negeri yang membengkak, dan inflasi yang menghantam perekonomian. Peristiwa Mei 1998, khususnya kerusuhan pada 13 dan 14 Mei, juga menjadi faktor penting. Sebagai presiden, Habibie memfokuskan kebijakannya pada pemulihan ekonomi pasca krisis, termasuk mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan membentuk regulator perbankan nasional..

REFERENCE

- [1] D. M. Mengko, *Intelijen dan kekuasaan Soeharto*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- [2] L. E. Aprilia and K. Swastika, "Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998," 2014.
- [3] M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi, 2008.
- [4] S. Said, *Ini Bukan Kudeta*. Mizan Publishing, 2018.
- [5] B. J. Habibie, "Detik-detik yang menentukan: jalan panjang Indonesia menuju demokrasi," 2006.
- [6] P. Manning, "News and news sources: A critical introduction," 2000.
- [7] K. K. Gie, "Analisis ekonomi politik Indonesia," 1995.
- [8] T. T. H. Tambunan and B. Purwoko, "Social protection in Indonesia," *Soc. Prot. Southeast East Asia–Towards a Compr. Pict.*, vol. 1, no. 1.66, pp. 1–35, 2002.
- [9] A. W. Pratiknya, "Pandangan dan langkah reformasi BJ Habibie," (*No Title*), 1999.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

[10] BPS, “Laporan BPS 1998-1999,” pp. 1998–2001, 1998.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.